

**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS , SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS BPKAD KOTA JAMBI)**

Juni Citra Yohana Manalu¹, Zulfanetti², Nurhayani³
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi
jcitra231@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine whether the seven components of financial statements have been prepared in accordance with SAP and to analyze the criteria for indicators related to financial statement presentation, accessibility, internal control systems, and accountability in local government financial management at the Jambi City BPKAD. The study employs a documentary and descriptive analysis approach. The results of the study indicate that the financial statements, comprising seven components namely the LRA, LPSAL, Balance Sheet, LO, LAK, LPE, and CaLK have been prepared in accordance with the accrual-based SAP as stipulated in Government Regulation No. 71 of 2010. The results regarding the second objective financial statement presentation, accessibility, and accountability in local government financial management indicate a level of compliance falling within the “Good” category. Meanwhile, the internal control system demonstrates achievement at the “Very Good” category level.

Keywords: SAP, PLK, Ak, SPI, APKD

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui tujuh komponen laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan menganalisis kriteria indikator variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, sistem pengendalian internal, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kota Jambi. Dengan menggunakan metode dokumentasi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang meliputi tujuh komponen yaitu LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK telah menerapkan pada SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No 71 Tahun 2010. Hasil tujuan yang kedua yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tingkat kesesuaian berada pada kategori “Baik”. Sedangkan, sistem pengendalian internal menunjukkan pencapaian pada tingkat kategori “Sangat Baik”.

Kata Kunci: SAP, PLK, Aksesibilitas, SPI, APKD

A. Pendahuluan

Pemerintah Daerah
sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang No.32 Tahun 2004

yang mengatur penyelenggaraan
pemerintah di Indonesia, memberikan
ruang luas untuk otonomi daerah,
menetapkan pembagian urusan

pemerintahan antara pusat dan daerah, serta mengatur pengelolaan keuangan daerah (Leatemia & Usmany, 2021).

Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tata kelola pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan kualitas pelayanan yang baik terkait pengelolaan laporan keuangan daerah (Mulyanto, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menetapkan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang menggunakan basis akrual. Dalam basis akrual, setiap transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan dilaporkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2025).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dengan tujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, dan hasil operasi suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari keterbukaan informasi keuangan, kemudahan dalam mengakses laporan keuangan. Dengan adanya transparansi tersebut, publik atau pengguna laporan keuangan dapat melihat dan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah serta memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah telah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Putri & Titah, 2023).

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam memberikan harapan yang layak atas tercapainya tujuan organisasi dengan memastikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, operasional dan administrasi pemerintahan, keamanan aset, serta ketaatan terhadap konstitusi yang ada (Nuzulla, 2024). Sedangkan Akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik untuk mengukur kesuksesan maupun kegagalan sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya (Rahayu & Defana, 2023).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode dokumentansi melalui dokumen Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2020-2024 untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang meliputi tujuh komponen dan analisis deskriptif dengan cara evaluasi dokumen untuk memberikan gambaran mengenai kriteria dari indikator variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa diidentifikasi laporan keuangan dalam dokumen tersebut yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Laporan keuangan tersebut meliputi:

1. Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan hasil analisis atau evaluasi data pada kriteria variabel penyajian laporan keuangan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Indikator PLK

Tahun	Penyajian Laporan Keuangan	Kriteria
2020	75	Baik
2021	75	Baik
2022	75	Baik
2023	75	Baik
2024	100	Sangat Baik

Pertumbuhan dari setiap indikator penyajian laporan keuangan menunjukkan belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal. Salah satunya yaitu indikator ketepatan waktu pada laporan keuangan daerah dari tahun 2020 sampai 2023 belum terstruktur sehingga tidak diketahui proses penyusunan dan penyampaian laporan kepada pihak terkait atau pengguna laporan keuangan. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi kenaikan yang lebih tinggi, peningkatan ini menunjukkan bahwa seluruh indikator yang menjadi tolok ukur dalam variabel tersebut telah berhasil dipenuhi secara menyeluruh, sehingga dapat diartikan bahwa penyajian laporan keuangan pada periode tersebut telah mencapai tingkat kesesuaian yang maksimal dengan kriteria yang berlaku.

Pada kriteria variabel aksesibilitas keuangan daerah ditampilkan pada tabel 2:

Tabel 2. Kriteria Indikator Ak

Tahun	Aksesibilitas	Kriteria
2020	50	Kurang Baik
2021	75	Baik
2022	100	Sangat Baik
2023	75	Baik
2024	100	Sangat Baik

Perkembangan pada masing-masing indikator variabel aksesibilitas menunjukkan semakin membaik dari tahun ke tahun. Kondisi ini menggambarkan adanya kemajuan yang konsisten dalam mempermudah masyarakat memperoleh informasi keuangan, meskipun sempat terjadi fluktuatif yang menunjukkan adanya tantangan atau penyesuaian dalam proses peningkatan tersebut.

Kriteria indikator variabel sistem pengendalian internal disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Indikator SPI

Tahun	Sistem Pengendalian Internal	Kriteria
2020	80	Baik
2021	100	Sangat Baik
2022	100	Sangat Baik
2023	80	Baik
2024	100	Sangat Baik

Pertumbuhan dari setiap indikator menunjukkan relatif konsisten sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Sistem pengendalian internal pada BPKAD Kota Jambi telah diterapkan melalui berbagai mekanisme atau indikator. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan efektif memenuhi sebagian besar

kriteria yang ditetapkan, walaupun sepenuhnya belum optimal.

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mengindikasikan pada penilaian masing-masing tahun berdasarkan indikator dapat disajikan pada tabel 4:

Tabel 4. Kriteria Indikator APKD

Tahun	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria
2020	75	Baik
2021	100	Sangat Baik
2022	75	Baik
2023	75	Baik
2024	100	Sangat Baik

Hasil evaluasi data yang diteliti menggambarkan bahwa adanya kemajuan yang konsisten dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah BPKAD Kota Jambi terlihat dari peningkatan secara fluktuasi pada kriteria indikator per tahunnya.

D. Kesimpulan

Komponen laporan keuangan daerah yang dipublikasikan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi telah menerapkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas menunjukkan tingkat kesesuaian berada pada kategori “Baik”. Sedangkan, sistem pengendalian internal menunjukkan pencapaian pada tingkat kategori “Sangat Baik”, namun akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menggambarkan tingkat capaian kategori “Baik” selama periode 2020 hingga 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Leatemala, & Usmany, P.(2021). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, 9(2), 119–130.
- Mulyanto, M., Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. *JBE (Jurnal Bingkai Ekonomi)*, 6(1), 1–17.

- <https://doi.org/10.54066/jbe.v6i1.90>
- Nuzulla, N. F., Maslichah, & sari, A. F. K. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintahan Desa di Kec. Kunjang, Kab. Kediri). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13 No.02(02), 18–29.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Standar Akuntansi Pemerintahan. *KSAP*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*. Retrieved from <https://www.jurnal.id/id/blog/standar-akuntansi-pemerintahan-dalam-akuntansi-pemerintah-adalah/>
- Putri, S. Y. A., & Titah, R. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 3(1), 43–58. <https://doi.org/10.31933/jaaip.v3i1.894>
- Rahayu, S., & Defana, F. A. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 21–30. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2681>